

Signifikansi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pendidikan Keluarga

Hendro Juwono,¹ Vaesol Wahyu Eka Irawan,² Fawait Syaiful Rahman³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Email: hendrojuwono86@gmail.com, vaesolwahyu82@gmail.com,
fawaidnyaifulrahman@gmail.com

Abstract Family is a term for the relationship between husband and wife or parents and children. In Islam, family is a translation from Ahlun Arabic. Although the word Ahlun itself has many meanings, including groups, groups, or followers. The function of the family in the education and development of the basic values of a teaching has proven effective. The research method used is qualitative with the type of literature research. Data sources use Documentation, and Data analysis uses descriptive. Based on the results of the study, the following conclusions were obtained, pancasila Idiology is the views and principles of every citizen in the nation and state. A good citizen should reflect the paradigm, attitude, and love behavior of the Republic of Indonesia. Pancasila idiology is not just a slogan, but it animates all the activities of everyone in the territorial area of the Indonesian State. The development of Pancasila idiology based on Family education means teaching and instilling the basic principles of Pancasila through the introduction and actualization of Pancasila values into the life of the nation and state. A family consisting of husband and wife or parents and children, of course, parents are responsible for the basic education of the family. The strategic position of the family in constructing thoughts and beliefs is the main medium in the cultivation of Pancasila idiology.

Keywords: Pancasila Development, Family Education.

Abstrak Keluarga merupakan sebutan bagi relasi suami istri atau orang tua dan anak. Di dalam Islam, keluarga adalah terjemahan dari bahasa arab Ahlun. Meski kata Ahlun sendiri memiliki banyak pengertian, diantaranya adalah kelompok, golongan, atau pengikut. Fungsi keluarga dalam pendidikan dan pembinaan nilai-nilai dasar suatu ajaran telah terbukti efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian pustaka. Sumber data menggunakan Dokumentasi, dan Analisis data menggunakan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian didapat kesimpulan sebagai berikut Idiologi Pancasila adalah pandangan dan prinsip setiap warga Negara dalam berbangsa dan bernegara. Warga Negara yang baik selayaknya mencerminkan paradigma, sikap, dan tingkah laku cinta NKRI. Idiologi Pancasila bukan sekedar slogan, namun ia menjiwai segala aktivitas setiap orang di daerah teritorial Negara Indonesia. Pembinaan idiologi Pancasila berbasis pendidikan Keluarga berarti mengajarkan dan menanamkan prinsip-prinsip dasar Pancasila melalui pengenalan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keluarga yang terdiri dari suami-istri atau orang tua dan anak maka sudah barang tentu orang tua bertanggungjawab atas pendidikan dasar keluarga. Posisi strategis keluarga dalam mengkonstruksi pemikiran dan keyakinan menjadi media utama dalam penanaman idiologi Pancasila.

Kata Kunci: Pembinaan Pancasila, Pendidikan Keluarga

A. PENDAHULUAN

Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, belum sepenuhnya merasa aman dari rong-rongan kelompok-kelompok tertentu yang bertujuan melakukan penolakan terhadap sistem pemerintahan Indonesia dan dasar Negara meski tidak diungkapkan secara tegas, bahkan ada pula kelompok secara terang-terangan menyuarakan hasil pemikiran mereka tentang sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem thogut yang diadopsi dari Negara-negara Kafir (Fitriono and Suhono 2017).

Bias faham keagamaan dari kelompok ekstrim yang meyakini sistem pemerintahan ala Barat termasuk Demokrasi di Indonesia sebagai produk kafir terlihat di beberapa Negara seperti di Amerika Serikat 11 September 2001, perang Teluk antara Irak dan Kuwait tahun 1990, dan invasi Nato ke Irak dalam rangka menggulingkan pemerintah Saddam Husain tahun 2003. Di Indonesia juga tidak luput dari objek sasaran penyerangan kelompok

terorisme atau kelompok radikalisme. Pasca kejadian 09 September 2001 (MTC), aksi teror dari terorisme berlanjut di tahun 2002, tepatnya di Sari Club dan Paddy's Club Kuta Legian Bali 12 Oktober 2002 yang dikenal dengan sebutan Bom Bali 1 (Carolina 2019).

Bom Bali 1 bukan kejadian pertama sekaligus terakhir. Dalam tahun yang sama, bom bunuh diri terjadi kembali di Indonesia, seperti Bom Kedubes Australia 2004, bom Bali 2 tahun 2005, bom bunuh diri di Polresta Cirebon tahun 2011, bom Thamrin dan bom Mapolresta Surakarta 2016, bom di halte Busway Kampung Melayu 2017 dan yang terbaru lainnya (Carolina 2019).

Awal mula terjadinya tragedi Bom Bali 1 tidak terlepas dengan Terorisme Internasional atau Jama'ah Islamiyah (JI) Internasional (1993). JII didirikan oleh Abdullah Sungkar, dan Indonesia menjadi salah satu objek lahan dakwah mereka. Relasi pimpinan di dalam tubuh JII kurang sehat sehingga menyebabkan perpecahan khususnya di ranah pemikiran sampai terjadi metaformasi tiga pemikiran. Faksi ideologis dipimpin oleh Abu Rushdan, faksi moderat dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir, faksi radikal liar ekstrim dipimpin oleh Hambali dan Zulkarnaen. Jama'ah Islamiyah Indonesia Mantiqi Tsani II, Mantiqi Ula I yang dipimpin oleh Hambali berjihad, dan Noordin M. Top berjihad dengan menggunakan bom yang diledakkan di Bali. Hambali dan Noordin M Top masuk ke Indonesia melalui wilayah perbatasan yang kurang mendapat perhatian Negara. Kelengahan tersebut menjadi kesempatan mas bagi kelompok radikal masuk ke Negara Indonesia (Mulyawan 2014).

Menurut M.A. Hikam, kelompok radikal adalah kelompok dengan gagasan, pemikiran dan aksi yang bertujuan untuk mengganti secara fundamental terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara bertentangan dan/atau melawan

Pancasila dan UUD 1945 (M. A. Hikam 2016). Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat beberapa kriteria suatu kelompok dapat dikatakan radikal, diantaranya faham dan gagasan yang radikal (ektrim kanan atau ektrim kiri), dan gerakan anti NKRI. Gerakan kelompok teroris dilakukan dengan dua cara; cara pertama secara terang-terangan dan kedua lunak, semua cara dilakukan secara terorganisir. Apabila aksi teroris tersebut ditinjau dari pengaruh dan bahaya yang ditimbulkan, maka aksi secara lunak namun terorganisir lebih berbahaya, sebab aksi yang dilakukan dengan cara samar dan halus untuk mempengaruhi orang lain anti NKRI sulit dilacak oleh aparat keamanan negara.

Dalam tulisan artikel Sitti Aminah, disebutkan faktor yang menyebabkan munculnya radikalisme sangat kompleks, Sitti Aminah menyebut faktor yang kompleks dengan multi faktor dalam perspektif disiplin ilmu tertentu. Diantaranya adalah kelompok yang mendominasi pada suatu sistem yang berdampak pada kesenjangan tajam di tengah masyarakat, khususnya perkotaan sehingga menimbulkan fatalisme. Selain itu, pemicu radikalisme dalam perspektif sosiologis, adalah krisis identitas generasi muda, ketergoncangan moral, perbedaan ideologi dan jaringan sosial, dan ketiga perspektif ekonomi adalah kesenjangan ekonomi yang menimbulkan kecemburuan sosial (Aminah 2016).

Eksistensi kelompok radikal di tanah air mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Keseriusan Pemerintah menangani kelompok Radikalis terorisme dapat dilihat dari terbentuknya Perpu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 dan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme. Sebelum dua aturan tersebut disahkan, tidak dapat dipungkiri bahwa kewenangan aparat penegak hukum sangat terbatas, utamanya dalam penanganan dan tindakan yang harus diambil dalam kasus terorisme. Setelah Perpu Ormas No. 2 Tahun 2017 dan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme disahkan maka eksistensi aparat semakin tampak ke permukaan meski juga tidak bisa menutup mata akan

kemunculan dinamika baru terhadap kelompok-kelompok radikal di Indonesia (M. A. S. Hikam and Riyanta 2018).

Adi Sulistyو dalam tulisan berjudul “Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kontra-Terrorisme” mengutip pandangan Gortney, William E., Joint dalam buku “*Antiterrorism*” menyebut salah satu objek terorisme adalah penolakan Idiologi Negara (Sulistyو, n.d.) dan menawarkan sistem Negara Islam berupa Khilafah. Idiologi Pancasila sebagai dasar Negara wajib dirawat dan dijaga oleh setiap warga Negara Indonesia. Warga Negara Indonesia adalah komponen dari sistem Negara Indonesia. Apabila satu dari sekian komponen sistem Negara tidak berfungsi maka berpengaruh terhadap sub sistem yang lain. Sebagai sub sistem, warga Negara memiliki peran penting dalam menjaga Idiologi Pancasila, salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah melakukan pembinaan idiologi pancasila terhadap keluarga.

Keluarga merupakan sebutan bagi relasi suami istri atau orang tua dan anak. Di dalam Islam, keluarga adalah terjemahan dari bahasa arab Ahlun. Meski kata Ahlun sendiri memiliki banyak pengertian, diantaranya adalah kelompok, golongan, atau pengikut (Ahmad Warson Munawwir 1997). Fungsi keluarga dalam pendidikan dan pembinaan nilai nilai dasar suatu ajaran telah terbukti efektif. Hipotesis ini didukung oleh banyak referensi pendukung, baik dari ilmu-ilmu sosial atau ajaran Islam sendiri. Pada artikel ini akan diulas secara komprehensif bagaimana pembinaan idiologi Pancasila di dalam keluarga sebagai basis pendidikan utama. Tema ini sangat penting diulas sebagai wujud pengejuantahan atas maraknya pemahaman aktrim di tanah air.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis pustaka. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk objek alamiah (Darmalaksana 2020). Sedangkan jenis penelitian pustaka adalah penelitian yang fokus kajiannya berupa catatan penting seperti buku, UU, artikel, berita, dan surat kabar lainnya (Darmalaksana 2020). Metode analisis data menggunakan deskripsi (Anonim 2020), yaitu penelitian yang mencoba mendeskripsikan temuan-temuan dalam studi pustaka. Objek kajian penelitian ini adalah dokumentasi yang berkaitan dengan judul penelitian, seperti buku tentang ideologi Pancasila, strategi dan langkah-langkah pembinaan, dan pendidikan keluarga.

C. HASIL PENELITIAN

1. Konsep Ideologi Pancasila

Kata ideologi jika ditinjau dari derivasi kata tersusun dari dua kata yaitu *idea* dan *logos*. *Idea* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti gagasan, dasar, dan cita-cita (Indonesia 2002),. Sedangkan *logos* berarti ilmu (Mujib 2019). Ketika dua kata tersebut dikodifikasi menjadi satu kesatuan maka dapat diartikan dengan ilmu yang membahas tentang ide, gagasan pokok, atau cita-cita. Ideologi terus berkembang, dalam konteks Negara, ideologi menjadi suatu paham yang dipegangi dan menjadi pandangan hidup (Subadi 2007). Kata ideologi pertama kali dimunculkan oleh filsuf Perancis bernama Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 atau tahun 1796 dan kemudian dipakai Napoleon (Asy'arie 2005).

Indonesia memilih Ideologi yang bersumber dari watak bangsa sendiri, dimana kultur dan budaya diperas menjadi nilai-nilai universal yang disebut dengan Pancasila (Rizkianto 2021). Menurut Nurul Fadilah dalam artikel berjudul "Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila

dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0” menyatakan bahwa sejarah perumusan Pancasila sangat panjang dan tidak lepas dari pengorbanan para *Vading Vather*. Oleh sebab itu, Pancasila yang dijabarkan pada masing-masing nilai harus diwujudkan pada berbagai aktivitas hidup, utamanya pada wilayah sosial keagamaan (Fadilah 2019).

Ideologi Pancasila berarti menjadikan Pancasila sebagai pandangan dan pegangan hidup warga Negara Indonesia dalam merepresentasikan cipta, rasa, dan karsa. Ideologi Pancasila bukan sekedar konsep yang mudah dijabarkan kepada orang lain. Ideologi Pancasila juga bukan sekedar perbincangan akademik. Justru, ideologi Pancasila berada pada sanubari setiap individu dan diimplementasi dalam cara pandang dan sikap, yang terwujud pada perilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Saat ini, kondisi masyarakat Indonesia, khususnya di era global hingga industri 4.0 justru semakin tergerus dan semakin jauh dengan cita-cita Nurul Fadilah. Salah satunya seperti korupsi, pemakaian napza, perbuatan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, manipulasi data-data pendidikan, hingga perbuatan persekusi kepada sesama warga Negara. Perilaku demikian, mencerminkan Pancasila masih sebatas semboyan dan belum membumi ditengah masyarakat, meski perkara yang melatarbelakangi adalah sistem yang terbangun secara kompleks seperti perceraian orang tua, kehidupan tidak punya, ketimpangan sosial, dan kondisi lainnya.

Pembinaan Ideologi Pancasila

Pembinaan dilihat dari struktur kalimatnya merujuk pada proses atau rangkaian kegiatan tersistem untuk mencapai sebuah cita-cita bersama. Pengertian Pembinaan dalam KBBI adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh

hasil yang lebih baik (Indonesia 2002). Pembinaan adalah usaha atau tindakan dari kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna (Sudarsana 2014). Berdasarkan pengertian pembinaan tersebut, dapat disimpulkan yang dimaksud Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan proses bina ideologi suatu Negara, dalam hal ini adalah Pancasila. Pembinaan ideologi Pancasila lebih mengarah pada lingkup prakek, yaitu bagaimana Pancasila sebagai ideologi mampu merefleksi pada kehidupan setiap warga negara.

Embrio dari pembentukan lembaga pembinaan ideologi Pancasila telah ada sejak tahun 2017 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun pada perkembangannya, eksistensi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP perlu ditingkatkan, sehingga Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Februari 2018 menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang kemudian disingkat dengan BPIP.

Latarbelakang revitalisasi BPIP dari sebelumnya berupa UKP-PIP adalah status dari Unit Kerja Presiden dirasa belum cukup menjalankan fungsi sebagaimana harapan Presiden, karena masih berbentuk Unit Kerja, belum berwujud Badan. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan Lembaga Nonstruktural. Akhirnya, pada tanggal 28 Februari 2018 dengan proses penandatanganan Peraturan Presiden, Unit Kerja Presiden resmi menjadi Badan dengan harapan eksistensi BPIP benar-benar sesuai dengan harapan Nawacita Bapak Presiden Joko Widodo (Fatmala 2019).

Sepak terjang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam struktural pemerintahan dapat dilacak dari eksistensi nya. Eksistensi BPIP berwujud statis dan dinamis. Di tengah isu yang mengancam

keutuhan Negara Indonesia, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tampil dengan ide cukup mendasar (Irwanto, Fahmal, and Qamar 2021). Di dalam Bab III Pasal 3 Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyebutkan tugas BPIP yaitu membantu Presiden merumuskan arah ideologi Pancasila, selain tugas nya yang besar, fungsi BPIP ada 11, diantaranya adalah penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila, penyusunan dan perencanaan rencana kerja dan program pembinaan Pancasila.

Membumikan nasionalisme-agamis kepada warga Negara Indonesia menjadi tugas setiap elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah. Indonesia adalah rumah bersama, dihuni oleh penduduk dengan 6 agama yang berbeda, terdiri dari macam-macam suku, budaya, bahasa, warna kulit yang berbeda pula. Jika tugas mulia membumikan idiologi Pancasila hanya diserahkan kepada segelintir orang maka hasilnya kurang maksimal. Namun jika setiap warga Negara bertanggungjawab dan merasa saling memiliki Negara Indonesia dengan cara memahami pengertian idiologi Pancasila maka akan terbentuk sistem Negara yang kuat dalam penanaman dan pengamalannya.

Pembinaan Idiologi Pancasila artinya memperkenalkan idiologi Pancasila kepada setiap penduduk dengan cara apapun. Melakukan pembinaan artinya melakukan usaha terencana untuk menanamkan idiologi Negara kepada warga negara. Jika demikian, maka pembinaan idiologi Pancasila dapat dilakukan dengan dua cara, pertama pembinaan yang dilakukan secara formal, kedua yaitu pembinaan tidak formal. Pembinaan yang dilakukan secara formal telah diwujudkan pada keputusan Presiden berupa terbentuknya BPIP. Sedangkan pembinaan idiologi Pancasila tidak formal dapat diwujudkan di dalam keluarga masing-masing warga Negara berupa pengenalan dini idiologi Pancasila melalui alat-alat peraga, memasang foto-foto pahlawan Negara, foto

presiden Indonesia pertama hingga terakhir, mengajak anak menghafalkan nama-nama menteri, memperkenalkan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Memberi ruang warga Negara untuk ikut andil dalam pembinaan idiologi Pancasila sebagai bentuk pembinaan non formal adalah bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi, yaitu menciptakan kesadaran bersama bahwa mempertahankan idiologi dengan mempelajari secara mendalam dan mengamalkan dalam kehidupan adalah tugas bersama. Tidak berhenti disitu, keluarga bertanggungjawab terhadap komponen untuk ikut andil melakukan pembinaan mendasar tentang idiologi Pancasila beserta mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila ke dalam relasi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Pendidikan Keluarga

Pendidikan dalam keluarga dibagi pada dua periode. Pendidikan pertama diberikan sejak anak dalam kandungan., dan pendidikan kedua diberikan kepada anak pasca melahirkan. Pendidikan tersebut di dalam bahasa arab disebut dengan *Tarbiyah Qabla al-Wiladah* dan *Tarbiyah Ba'da al-Wiladah* (Octofrezi 2020). Ibu sebagai madrasah pertama anak (Parhan and Kurniawan 2020), dapat menanamkan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Pancasila kepada anak setelah anak mulai mengerti hingga dewasa. Menurut Novi Cahya Dewi dalam artikel berjudul “Keluarga sebagai Madrasah Pertama dan Optimalisasi fungsi Edukatif Pada anak Usia Dini” menjelaskan bahwa lingkungan keluarga sebagai lembaga penanaman pendidikan dasar anak seperti mengukir di atas batu dengan arti anak lebih mudah mengingat dan mengerti materi dasar yang diajarkan, sebaliknya jika mendidik dilakukan saat anak dewasa bahkan tua ibarat mengukir dilautan dengan arti mudah sekali lupa, karena disibukkan dengan berbagai aktivitas kehidupan sehingga membuat pembelajaran kurang efektif (Dewi 2019).

Islam sangat memperhatikan Pendidikan di dalam keluarga (Adi 2022) sebelum dan sesudah anak dilahirkan. Sebaliknya, sebagian pemeluk Islam memandang pendidikan dimulai sejak anak lahir atau sejak anak berada dibangku sekolah. Pandangan semacam itu menyebabkan para orang tua lengah atas penanaman pendidikan dasar anak. Para orang tua lebih memilih bekerja untuk kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anak, ketimbang pendidikan anak itu sendiri. Mereka para orang tua memasrahkan pintar atau tidak nya anak kepada sekolah atau para guru, sedangkan pada saat yang sama anak telah luput dari pendidikan dasarnya, dan yang lebih parah anak tidak berada dalam pengawasan orang tua, sehingga sering mendapat pembelajaran dari lingkungan yang tidak positif, seperti berkata kotor, melawan kepada orang tua saat dinasehati, memukul teman-temannya, kencing berdiri, dan sikap usil lainnya. Kebiasaan anak seperti demikian beralih menjadi tanggung jawab guru atau ustad ketika anaknya masuk sekolah. Setelah anak masuk sekolah dengan sikapnya yang melampaui batas kewajaran justru dianggap kesalahan guru yang tidak becus mendidikan anak di sekolah.

Hadist Rasulullah banyak menjelaskan bahwa orang tua dianjurkan untuk mengajari anak tentang sholat sejak usia anak memasuki 7 tahun (Zulkarnain, Anshori, and Mahmud 2014), dan memukul anak dengan tanpa menyakiti baik fisik atau psikis pada usia baligh. Ini artinya, pendidikan yang diberikan kepada anak sejak dini mutlak menjadi tanggungjawab orang tua masing-masing, bukan guru atau ustad disekolah (Mahfud 2021). Komplexitas problem yang terdapat di rumah tangga menjadi sebab utama bagi pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan mereka dengan cara mendirikan pendidikan formal, informal, dan non formal, sehingga keluarga yang kurang kompeten atau sibuk dengan pekerjaan dapat menitipkan anak mereka

kepada lembaga tersebut. Keberadaan lembaga dari formal, informal, dan non formal bukan berarti menghilangkan tugas pokok orang tua untuk mengenalkan dan menanamkan pendidikan dasar dan melimpahkan kepada guru atau ustad disekolah.

Pendidikan adalah usaha yang konsen mengembangkan potensi dasar baik jasmani dan rohani secara sadar, terencana, dan terstruktur yang dilakukan melalui proses panjang dan berjenjang agar bisa menggapai segala tujuan (Amin 2018). Pendidikan keluarga tidak berbeda dengan pendidikan formal lainnya, pada intinya di dalam pendidikan keluarga terdapat komponen orang tua dan anak, orang tua sebagai guru dan anak sebagai murid. Orang tua berupaya memfasilitasi kegiatan belajar mengajar kepada anak untuk mendapatkan pembelajaran pendidikan dasarnya, orang tua belajar dan mengajar, sedangkan anak objek belajar. Pendidikan di dalam keluarga tidak bisa berdiri sendiri karena fokus pendidikannya adalah penanaman pendidikan dasar, sedangkan pengembangan pendidikan dapat dilanjutkan pada sekolah formal. Posisi pendidikan keluarga tersebut bukan tidak esensi, justru penanaman pendidikan dasar anak menjadi pondasi utama yang dapat menopang berbagai disiplin ilmu lainnya (Nasution 2019).

3. Wujud Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pendidikan Keluarga

Ketika manusia pertama kali lahir mendapati suasana dan nuansa berbeda dari tempat yang sebelumnya yaitu kandungan orang tua. Ekspresi manusia terhadap suasana dan nuansa yang berbeda tersebut seringkali diekspresikan dalam wujud tangisan keras yang kita sebut dengan suara bayi. Keluarga adalah lingkungan pertama anak, utamanya ibu. Perkembangan dan pertumbuhan bayi manusia memberi pelajaran secara alami bahwa orang-orang yang disaksikan setiap hari adalah tempat ternyaman dan teraman. Ia tidak merasa takut namun justru merasa aman saat bersama lingkungan keluarga. Keluarga dalam

perasaan anak merupakan tempat yang sangat urgen. Anak-anak

memperoleh pengalaman pertamanya dari keluarga (Nasution 2019).

Dalam ilmu psikologi, emosi sosial anak bayi akan terbentuk dan tereksplor jika lingkungannya mendukung. Kriteria lingkungan yang mendukung eksplorasi anak dapat dilihat seandainya lingkungan tersebut dirasa telah memenuhi kebutuhan bayi, sebaliknya jika lingkungan dirasa tidak memberi kebutuhannya, maka ia akan menghabiskan energi untuk beradaptasi dengan lingkungannya tersebut. Hal ini, memberi pemahaman bahwa lingkungan sangat menentukan terhadap perkembangan eksplorasi emosi sosial anak. Proses belajar anak pada usianya yang krisis atau usia emas sangat menentukan pula terhadap kelanjutan eksplorasi perkembangan emosi sosial bayi. Menurut Femmi Nurmalitasari menyatakan;

“masa perkembangan bayi hingga memasuki sekolah dasar menjadi “fondasi” belajar yang kuat bagi anak untuk mengembangkan kemampuan sosial emosinya menjadi lebih sehat dan anak siap menghadapi tahapan perkembangan selanjutnya yang lebih rumit. Pada tahap krisis inilah menjadi waktu yang tepat dalam meletakkan dasar-dasar pengembangan kemampuansosial emosi.

Peran orang tua sebagai figure memiliki keunggulan sendiri dalam relasi orang tua dan anak. Segala hal yang muncul dari orang tua merupakan ilmu bagi anak. Posisi orang tua bagi anak ibarat air mancur atau air mengalir. Anak secara alami akan meniru berbagai refleksi yang bersumber dari orang dengan tanpa filterisasi. Tidak heran jika Hadist Rasulullah SAW menyebutkan:

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجِجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ، هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ

Artinya: Tidak ada yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan suci, kemudian orang tuanya menjadikannya beragama Yahudi, beragama Nasrani, beragama Majusi.

Benang merah dari hadits di atas adalah pengaruh relasi keluarga antara orang tua dan anak sangat besar. Anak secara umum mengikuti karakter dan watak kedua orang tuanya, termasuk dalam urusan agama. Model pendidikan di dalam keluarga berbeda-beda, ada keluarga yang getul dan ketat dalam mendidik anak, ada pula model orang tua yang acuh terhadap pendidikan anak, dan adapula orang tua yang sangat mengekang permainan anak dan adapula orang tua yang mempersilahkan anak bermain sesuai usianya namun tetap melaksanakan penyaringan terhadap apapun yang menjadi lingkungan anak. Pada kajian artikel ini, penulis ingin mendeskripsikan praktek-praktek yang merefleksikan orang tua menanamkan ideologi Pancasila dalam keluarga.

Pembinaan ideologi Pancasila kepada anak dengan memperkenalkan foto-foto pahlawan nasional. Pahlawan nasional yang telah berjuang dengan pengorbanan materi dan immateri menjadi materi penting untuk disinggung dalam pembinaan orang tua kepada anak. Cerita tentang tokoh-tokoh nasional dalam perjuangan kemerdekaan menjadi orientasi utama penanaman ideologi Pancasila. Selain foto-foto nasional, gambar Garuda bertuliskan Pancasila penting juga diperkenalkan kepada anak, berikut penjelasan-penjelasan sederhana, dan praktek sila-sila pertama sampai ke-lima dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mengajarkan anak peduli kepada sosial, memberi kesempatan kepadanya untuk menyerahkan sedekah pada kotak amal dan sedekah lainnya. Anak akan terkonstruksi untuk memberi dalam rangka kepedulian kepada sesama. Perbuatan semacam itu adalah bagian penting merawat.

Selanjutnya pembinaan ideologi Pancasila dengan memperkenalkan sejarah kemerdekaan Indonesia yang penuh dengan

perjuangan para syuhada'. Orang tidak banyak menyukai sejarah, karena membaca sejarah dirasa cukup membosankan. Namun, jika sejarah ditinggalkan maka jejak-jejak para pejuang ikut hilang. Bercerita sejarah bagaimana Indonesia memperoleh kemerdekaannya dalam jangka waktu secepat-cepatnya berkonsekuensi terhadap timbulnya rasa memiliki terhadap bangsa ini dan bertekad untuk mempertahankan kemerdekaan dari berbagai rong-rongan kelompok radikal.

Selain menceritakan kemerdekaan Indonesia, mengajak keluarga pada makam-makam pahlawan menjadi bagian penting terhadap penanaman ideologi Pancasila. Ini bagian dari nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa. Datang pada makam-makam para pejuang memunculkan rasa iba yang kuat, sekaligus menciptakan rasa ingin ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saat ini tidak banyak dari kita yang melakukan upaya-upaya seperti di atas. Kita sering memasrahkan dan mempercayakan kedewasaan anak pada lembaga pendidikan. Keluarga di rumah yang seharusnya menjadi sentral utama penanaman ideologi Pancasila belum tersentuh sering kali tidak terfikirkan. Beberapa contoh pelaksanaan penanaman ideologi Pancasila tersebut dapat disempurkan oleh para pakar pendidikan, khususnya yang konsen dalam ilmu pendidikan keluarga dan psikologi.

D. KESIMPULAN

Penanaman ideologi Pancasila pada setiap lini kehidupan saat ini wajib dilakukan, utamanya di dalam Pendidikan Keluarga. Keluarga yang merupakan kumpulan dari relasi suami-istri dan atau orang tua dan anak memiliki keunggulan tersendiri dalam pembinaan nilai dasar suatu, tidak terkecuali pembinaan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah pandangan dan prinsip setiap warga Negara dalam berbangsa dan bernegara. Warga Negara yang baik selayaknya mencerminkan paradigma, sikap, dan

tingkah laku cinta NKRI. Idiologi Pancasila bukan sekedar slogan, namun ia menjiwai segala aktivitas setiap orang di daerah teritorial Negara Indonesia. Pembinaan idiologi Pancasila berbasis pendidikan Keluarga berarti mengajarkan dan menanamkan prinsip-prinsip dasar Pancasila melalui pengenalan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keluarga yang terdiri dari suami-istri atau orang tua dan anak maka sudah barang tentu orang tua bertanggungjawab atas pendidikan dasar keluarga. Posisi strategis keluarga dalam mengkonstruksi pemikiran dan keyakinan menjadi media utama dalam penanaman idiologi Pancasila.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, La. 2022. "Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam." *JURNAL PENDIDIKAN AR-RASYID* 7 (1): 1–9.
- Ahmad Warson Munawwir. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab - Indonesia*. Edited by Kh Zainal Abidin Munawwir Kh. Ali Ma'sum. 4th ed. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Amin, Alfauzan. 2018. "Sinergisitas Pendidikan Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat; Analisis Tripusat Pendidikan." *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam* 16 (1): 106–25.
- Aminah, Siti. 2016. "Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia." *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 4 (1): 83–101.
- Anonim. 2020. "Pengertian Dan Jenis Metode Deskriptif." *Idtesis*, Diakses pada 1 November 2020. <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>.
- Asy'arie, Musa. 2005. "Islam Di Tepian Revolusi: Ideologi Pemikiran Dan Gerakan." *Yogyakarta: Pilar Media*.
- Carolina, Anita. 2019. "Deradikalisasi Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13 (3): 9.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.

- Dewi, Novi Cahya. 2019. "KELUARGA SEBAGAI MADRASAH PERTAMA DAN OPTIMALISASIFUNGSI EDUKATIF PADA ANAK USIA DINI." *JURNAL ILMIAH EDUKATIF* 5 (1): 66–72.
- Fadilah, Nurul. 2019. "Tantangan Dan Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0." *Journal of Digital Education, Communication, and Arts (DECA)* 2 (2): 66–78.
- Fatmala, Kurnia. 2019. "Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila Ditinjau Dari Konsep Masalah Mursalah." Uin Sunan Ampel Surabaya.
- Fitriyono, Eko Nani, and Suhono Suhono. 2017. "Wacana Negara Islam: Kajian Kritis Kontruksi Pemikiran Khilafah Ala Hizbut Tahrir." *Riayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 2 (2): 43–55.
- Hikam, Muhammad A S, and Stanislaus Riyanta. 2018. "Perkembangan Kelompok Radikal Di Indonesia Pasca Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 Dan UU Nomor 5 Tahun 2018 Terorisme Dalam Perspektif Keamanan Nasional." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 8 (3): 47–68.
- Hikam, Muhammad AS. 2016. "Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme Deradikalisasi." *Kompas*, no. April: 107–10.
- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa. 2002. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga." *Jakarta: Balai Pustaka*.
- Irwanto, Hartono Tasir, A Muin Fahmal, and Nurul Qamar. 2021. "Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Struktur Pemerintahan Di Indonesia." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 2 (1): 48–63.
- Mahfud, Mahfud. 2021. "Hukuman Dalam Hadis Tentang Perintah Shalat." *FATAWA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2 (1): 146–60.
- Mujib, Abdul. 2019. "Hakekat Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Islam." *Riayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 4 (1): 44–59.
- Mulyawan, Brian Adam. 2014. "Faktor–Faktor Penyebab Berkembangnya Terorisme Di Indonesia Kurun Waktu 2002–2005." *Global and Policy Journal of International Relations* 2 (2).
- Nasution, Sangkot. 2019. "Pendidikan Lingkungan Keluarga." *Tazkiya* 8 (1).
- Octofrezi, Permana. 2020. "Pendidikan Janin Pada Masa Pre-Natal (Kehamilan) Sampai Dengan Post-Natal (Pasca Persalinan) Ditinjau

Dari 6 Kategori Rumpun Pendidikan Islam Dan Asas Hikmah.”
Belantika Pendidikan 3 (1): 31–42.

Parhan, Muhamad, and Dara Puspita Dewi Kurniawan. 2020. “Aktualisasi Peran Ibu Sebagai Madrasah Pertama Dan Utama Bagi Anak Di Era 4.0.” *JMIE (Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education)* 4 (2): 157–74.

Rizkianto, Anggit. 2021. *Relasi Agama Dan Pancasila: Mengukuhkan Karakter Kebangsaan*. Pustaka Aksara.

Subadi, Tjipto. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. BP-FKIP UMS.

Sudarsana, Undang. 2014. “Pembinaan Minat Baca.” *Universitas Terbuka* 1 (028.9): 1–49.

Sulistyo, Adi. n.d. “Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Kontra-Terrorisme.”

Zulkarnain, Nila, Ari Anshori, and Abdullah Mahmud. 2014. “Pendidikan Anak Usia 0-10 Tahun (Telaah Buku Islamic Parenting Karya Syaikh Jamal Abdurrahman).” Universitas Muhammadiyah Surakarta.